



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAL SAFRI
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 655679

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **12.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000
2. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/120 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, Rp. 750.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
8. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **90.000.000**



1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 325.130.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 217.943.525
F. HARTA LAINNYA	Rp. ----
Sub Total	Rp. 13.333.073.525
III. HUTANG	Rp. 2.857.996.802
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 10.475.076.723

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.